

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi dan juga sebagai bahan pembanding karena mempunyai bahasan dengan tema sejenis. Penelitian terdahulu berupa skripsi yang dijadikan referensi adalah penelitian berupa skripsi oleh Pangesti (2014), Riana (2014), Fitriana (2010), dan Imansari (2015).

Penelitian (Agustin Dwi Pangesti, 2014) dengan judul “Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dan Respon Kelompok Wanita Tani (KWT) “Srikandi” Dalam Penerapan Sistem Pertanian Semi Organik Pada Sawi Hijau (*Brassica juncea* L.). Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam penerapan sistem pertanian semi organik pada sawi hijau; (2) mendeskripsikan respon Kelompok Wanita Tani (KWT) “Srikandi” dalam penerapan sistem pertanian semi organik pada sawi hijau, dan menganalisis hubungan antara peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dengan respon Kelompok Wanita Tani “Srikandi” dalam penerapan sistem pertanian semi organik pada sawi hijau. Variabel yang digunakan adalah peranan penyuluh pertanian, pengetahuan, sikap Kelompok Wanita Tani, dan keterampilan Kelompok Wanita Tani. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Alat analisis kuantitatif dengan menggunakan korelasi Rank Spearman. Dalam pengukurannya disertai alat bantu pengukuran yaitu skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pembimbing termasuk dalam kategori sedang yaitu skor 6,3 atau 70%, peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai organisator dan dinamisator termasuk dalam kategori tinggi yaitu skor 5,0 atau 83,33%, peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai agen informasi dan penghubung termasuk dalam kategori sedang yaitu skor 11,7 atau 78%, dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai penasihat termasuk dalam kategori sedang yaitu skor 4,56 atau 76%. Berdasarkan analisis Korelasi Rank Spearman diketahui bahwa (r_s) sebesar 0,642, t_{hitung} 4,425 > t_{tabel} 2,048 maka terima H_a yaitu bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dengan respon Kelompok Wanita Tani “Srikandi” dalam penerapan sistem pertanian semi organik pada sawi hijau.

Penelitian (Nina Rosa Riana, 2014) yang berjudul “Pelaksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Perempuan”. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan; (2) mendeskripsikan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah model analisa interaktif dari *Miles dan Huberman*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peran TP.PKK khususnya program pendidikan dan keterampilan di Kecamatan Kaliore sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari prioritas dari program tersebut yaitu (a) peningkatan pengetahuan kader dan minat baca masyarakat dengan menggelar bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan kepada para kader; (b) peningkatan kualitas tenaga pendidik dengan memberikan pembinaan; (c) peningkatan keterampilan usaha dengan adanya pelatihan usaha; (d) kerjasama dengan pemerintah yaitu dengan adanya perjanjian MOU yang terjalin dengan baik.

Penelitian (Yustin Dian Fitriana, 2010) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Pekarangan Dengan Sistem Pertanian Organik Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan kelompok tani perempuan vigor asri melalui pemanfaatan pekarangan dengan sistem pertanian organik; (2) mendeskripsikan respon anggota terhadap kegiatan pemberdayaan melalui pemanfaatan pekarangan dengan sistem pertanian organik; (3) mengetahui adakah perbedaan tingkat kesejahteraan anggota kelompok tani perempuan vigor asri dengan masyarakat sekitar yang tidak mengikuti kegiatan pemberdayaan melalui pemanfaatan pekarangan dengan sistem pertanian organik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode sensus. Hasil dari penelitian adalah terdapat 3 tahapan dalam proses pemberdayaan anggota kelompok tani perempuan vigor asri, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap kegiatan intelektualitas. Respon anggota kelompok tani perempuan vigor asri dilihat dari 2 indikator yaitu sikap dan keterampilan anggota. Dan untuk tingkat kesejahteraan anggota kelompok dengan non anggota kelompok tani perempuan vigor asri dilihat dari 4 indikator kesejahteraan yaitu keadaan rumah tangga, kesehatan keluarga, pendidikan anak dalam keluarga, dan pendapatan rumah tangga.

Penelitian (Kresnawati Imansari, 2015) dalam penelitian mengenai “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Balai Perempuan Melati di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang; (2) menganalisis peran pemerintah dalam menyiapkan masyarakat ekonomi ASEAN khususnya pada program pemberdayaan perempuan Balai Perempuan Melati; (3) menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Balai Perempuan Melati di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Metode analisis yang digunakan meliputi metode deskriptif yaitu menggunakan *Interactive Model Of Analysis*. *Interactive Model Of Analysis* menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini adalah selama kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani yang dilakukan oleh Balai Perempuan Melati, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan secara urut dan terencana yaitu: 1) seleksi lokasi; 2) sosialisasi; 3) perencanaan kegiatan; 4) pelaksanaan kegiatan; 5) kegiatan pemberdayaan. Selain itu kegiatan pemberdayaan ini juga berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyiapkan masyarakat ekonomi ASEAN khususnya pada program pemberdayaan perempuan. Pemerintah menitik beratkan pada usaha ekonomi perempuan yang umumnya bersifat industri rumah tangga atau UKM.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa penelitian yang membahas hanya beberapa variabel yang digunakan dari pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut adalah variabel dari pemberdayaan Kelompok Wanita Tani terdiri dari sikap anggota Kelompok Wanita Tani, keterampilan Kelompok Wanita Tani, pendidikan anak anggota Kelompok Wanita Tani. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan telaah penelitian terdahulu dapat dilihat dari segi kesamaan dan perbedaan. Permasalahan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2010) yang mana ada kesamaan tujuan dan variabel yang digunakan diantaranya sikap anggota Kelompok Wanita Tani, keterampilan anggota Kelompok Wanita Tani, dan pengetahuan anggota Kelompok Wanita Tani. Terdapat 4 (empat) indikator kesejahteraan yaitu keadaan rumah tangga, pendidikan, dan pendapatan. Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah adanya perbedaan

pada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*).

2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Istilah ‘pemberdayaan’ diambil dari Bahasa Inggris ‘*empowerment*’, yang berasal dari kata dasar ‘*power*’ berarti kekuatan atau ‘*daya*’ dalam Bahasa Indonesia. Empowerment dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia. Maka definisi pemberdayaan dirumuskan sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau daya (*power*) pihak-pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani, 2004)

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah pembatasan waktu dan dana (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subjek. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

2.2.2 Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Sukmaniar, 2007). Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilemma-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama yang tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan

masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (G. Kartasasmita, 1996).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut : pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan, Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Agus Purbathin Hadi, 2004).

2.2.3 Strategi dan Metode Pemberdayaan

Strategi merupakan usaha-usaha menyeluruh yang dirancang untuk menjamin agar perubahan-perubahan yang diusulkan dapat diterima oleh partisipan atau berbagai kalangan yang terlibat dan dilibatkan dalam proses perubahan salah satunya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi oleh strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut (Mardikanto, Totok, Poerwoko Soebiato, 2013) strategi merupakan langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Berikut adalah pendekatan strategi pemberdayaan, yaitu :

1. Strategi sebagai suatu rencana

Sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan.

2. Strategi sebagai kegiatan

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk menenangkan persaingan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.

3. Strategi sebagai suatu instrument

Sebagai suatu instrument, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan.

4. Strategi sebagai suatu sistem

Sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang terpadu yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Strategi sebagai pola pikir

Sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki.

Beberapa pemahaman tentang beragam pengertian strategi dapat disimpulkan strategi merupakan proses sekaligus produk yang penting berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Menyusun instrument pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelum referensi yang ada dan temuan dari pengamatan lapang.
- b. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat.
- c. Mempersiapkan sistem informasi mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.

Dengan demikian bahwa penerima manfaat pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam. Mulai dari beragam mengenai karakteristik individunya, lingkungan, sosial, motivasi, dan kebutuhan sesuai tujuan yang dicapai.

Menurut (Mardikanto, Totok, Poerwoko Soebiato, 2013) selain strategi-strategi tersebut, pada perkembangan terakhir banyak diterapkan beragam metode pemberdayaan masyarakat partisipatif berupa :

a. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

Merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi pedesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara dan pemilihan teknik yang khusus untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi pedesaan.

b. PRA (*Participatory Rapid Appraisal*)

Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatangunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga berkelanjutan (*sustainability*) program dapat terjamin.

c. FGD (*Fokus Group Discussion*)

Diskusi kelompok yang terarah merupakan interaksi individu-individu sekitar 10-30 orang yang tidak saling mengenal yang dipandu oleh seorang pemandu (moderator) untuk mendiskusikan pemahaman tentang suatu program.

d. PLA (*Participatory Learning and Action*)

Metode ini adalah menggunakan pendekatan partisipasi penuh seluruh audiens. Dalam PLA, seorang pelatih lebih berfungsi sebagai fasilitator dan pengetahuan datang dari partisipan. Fasilitator bertugas untuk memancing partisipan agar dapat mengeluarkan ide-ide dan mendorong partisipan yang pasif untuk lebih aktif.

e. Pelatihan Partisipatif

Model pelatihan partisipatif dikemukakan oleh Paulo Freire, terdapat beberapa pendekatan yang dipakai seperti dalam beberapa penjelasan pengantar pelatihan PRA misalnya sering menggunakan beberapa langkah pendekatan, diantaranya (1) pengenalan kebutuhan; (2) penetapan prioritas masalah; (3) perencanaan kegiatan; (4) pemantauan kegiatan; (5) evaluasi kegiatan. Dan secara umum model-model sistem pelatihan dalam siklusnya terbagi kedalam tiga tahapan yaitu; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

2.3 Tinjauan Pemberdayaan Perempuan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Menurut (Aritonang dalam Ihromi, et al, 2000) pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan, dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman dibelakang) bagi suami serta anggapan “swarga nunut neraka katut” (kesurga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.
2. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, diantaranya: keterampilan menjahit, menyulam, serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan nantinya kembali bekerja di dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

Pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) menginginkan perempuan mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya materi dan nonmateri yang penting dan pembagian kembali kekuasaan di dalam maupun diantara masyarakat. Di Indonesia keberadaan perempuan yang jumlahnya lebih besar dari laki-laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan.

2.3.2 Indikator Keberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis, dalam (Edi Suharto, 2005) dijelaskan 8 indikator keberdayaan, antara lain :

1. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas media, bioskop, rumah ibadah dan lainnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (seperti beras, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (seperti sabun mandi, bedak, shampoo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang tuanya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, radio, televisi, koran, majalah. Seperti halnya diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang tuanya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga, yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yaitu sampel ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang bekerja dirumah.
6. Kesadaran hukum dan politik, yaitu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang yang melakukan protes. Misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, yaitu memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki point tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

2.4 Kelompok Wanita Tani (KWT)

2.4.1 Pengertian Kelompok Wanita Tani

Para isteri petani juga memiliki sesuatu wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Wadah kegiatan tersebut dinamakan Kelompok Wanita Tani (KWT). Kelompok Wanita Tani merupakan salah satu bentuk kelembagaan petani yang para anggotanya terdiri dari para wanita-wanita yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian. Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan ibu-ibu istri petani atau para wanita yang mempunyai aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.

Dal hal ini terlebih dahulu dibedakan antara istilah perempuan dengan wanita. Istilah perempuan adalah orang atau manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Sedangkan istilah wanita merupakan perempuan yang telah dewasa. Dalam hal ini istilah perempuan dimaksudkan bahwa mereka belum berdaya, belum berkarir, sehingga melalui kegiatan pemberdayaan dalam bentuk pembelajaran *life skill* dapat berdaya, berkarir atau produktif.

Berbeda dengan kelompok tani yang lainnya. Kelompok wanita tani dalam pembinaannya diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam lingkup rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian maupun perikanan, sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Selain itu, seiring berkembangnya kebutuhan perempuan pedesaan, kegiatan kelompok wanita tani diarahkan pula untuk memberikan pendidikan maupun pelatihan keterampilan perempuan.

1.5 Tinjauan Tentang Sikap

2.5.1 Pengertian Sikap

Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Sikap juga dapat diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas. Pengertian sikap itu sendiri dapat dipandang dari berbagai unsur yang terkait seperti sikap dengan kepribadian, motif, tingkah laku, keyakinan, dan lain-lain. Namun dapat diambil pengertian yang memiliki persamaan karakteristik; sikap ialah

tingkah laku yang terkait dengan kesediaan untuk merespon objek sosial yang membawa dan menuju ke tingkah laku yang nyata dari seseorang. Hal itu berarti suatu tingkah laku dapat diprediksi apabila telah diketahui sikapnya (Dr. Yayat Suharyat, 2005).

Menurut (Saefudin Azwar, 2002) sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek disertai dengan perasaan positif dan negatif. Kemudian para pakar psikolog mendefinisikan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Jadi sikap itu berhubungan dengan perasaan seseorang terhadap objek bukan tindakan, dimana perasaan ada kalanya positif dan negatif.

2.5.2 Komponen Sikap

Secara umum, dalam berbagai referensi, sikap memiliki 3 komponen yakni: (1) kognitif; (2) afektif; (3) kecenderungan tindakan. Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap objek atau subjek. Informasi yang masuk ke dalam otak manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi dengan pengetahuan yang telah ada didalam otak manusia. Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, dan sebagainya, pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu. Oleh karena itu, komponen afektif dapat dikatakan sebagai perasaan (emosi) individu terhadap objek atau subjek, yang sejalan dengan hasil penilaiannya. Sedangkan komponen kecenderungan bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya (Dr. Yayat Suharyat, 2005).

1.6 Tinjauan Tentang Keterampilan

2.6.1 Pengertian Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang atau warga masyarakat dalam mengadakan hubungan dengan orang lain dan kemampuan memecahkan masalah, sehingga dapat beradaptasi secara harmonis dengan masyarakat di sekitarnya (Cartledge & Milburn, 1992). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat (Arends, 2008) bahwa keterampilan sosial adalah perilaku-perilaku yang mendukung kesuksesan hubungan sosial dan memungkinkan individu untuk bekerja bersama orang lain secara efektif.

Keterampilan sosial sangat erat kaitannya dengan berbagai kemampuan lainnya seperti menjalin kerjasama dalam kelompok, berinteraksi dengan sebayanya, bergabung dalam kelompok, menjalin pertemanan baru, menangani konflik, dan belajar bekerja sama. Kurangnya

keterampilan sosial akan berdampak pada rendahnya prestasi, cenderung kesepian, dan menampakkan *self-esteem* yang rendah (D.Muijs dan D.Reynolds, 2008).

2.7 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Keluarga

2.7.1 Kesejahteraan Menurut BKKN

Menurut BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1997), keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang syah, memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antar anggota dengan masyarakat dan lingkungan. Berikut pengelompokan keluarga sejahtera yaitu :

1. Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera 1, yaitu :

- a. Seluruh anggota keluarga dapat makan 2 kali sehari atau lebih.
- b. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk masing-masing aktivitas seperti pakaian rumah, pakaian bekerja/sekolah, dan pakaian bepergian.
- c. Bagian terluas lantai rumah bukan tanah serta memiliki atap, lantai dan dinding yang baik.
- d. Bila anak atau anggota keluarga sakit langsung dibawa ke sarana atau petugas kesehatan atau pengobatan modern.
- e. Anak usia 7 – 15 tahun di dalam keluarga bersekolah.

2. Keluarga Sejahtera II

Indikator Keluarga Sejahtera II yaitu memenuhi persyaratan keluarga sejahtera 1 dan memenuhi ketentuan seperti dibawah ini :

- a. Paling kurang seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan.
- b. Melaksanakan ibadah secara teratur sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
- c. Seluruh anggota keluarga memiliki minimal 1 pasang baju baru dalam setahun terakhir.
- d. Luas lantai paling kurang 8 meter persegi untuk setiap anggota rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga berusia 10-60 tahun dapat membaca tulisan latin.
- f. Dalam 3 bulan terakhir seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.

3. Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah memenuhi syarat dalam keluarga sejahtera I dan II dan juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sebagian penghasilan keluarga ditabung baik dalam bentuk uang maupun barang.
 - b. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - c. Keluarga memperoleh informasi dari media suara, media cetak maupun media elektronik lainnya.
 - d. Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling tidak sekali dalam 2 bulan.
 - e. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang ada.
 - f. Meningkatkan pengetahuan keluarga.
4. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang masuk sejahtera III Plus yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh persyaratan diatas ditambah dengan 2 kriteria berikut :

- a. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan kegiatan sosial di masyarakat dalam bentuk materi.
- b. Minimal salah satu dari anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan ataupun institusi masyarakat.